

PERMINTAAN PEMBIAYAAN UMKM KE PERBANKAN SYARIAH DI SUMATERA BARAT

NENG KAMARNI

Universitas Andalas, Padang
E-mail: nengkamarni71@gmail.com

HEFRIZAL HANDRA

Universitas Andalas, Padang
E-mail: hefrizalhendra@gmail.com

Abstract

The demand for Islamic financing from Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is important to be analyzed since they have a significant role in employment and the source of living for community. Quantitatively, the income and profits of MSMEs have a big impact on the gross regional domestic product (GRDP) where the MSMEs are located. They can be one of the drivers of the real sector of economy to improve the welfare of the community. The Islamic financing scheme is an alternative to strengthen the MSMEs and this is in line with the culture of the people of West Sumatra. This study aims to analyze the factors related to the demand for Islamic banking financing in helping micro, small and medium businesses to finance the capital expenditure in West Sumatra. The data used in this research is directly collected from the field. About 100 samples are chosen from 3,105 MSMEs that have already accessed capital financing from various Islamic Bank in West Sumatra. A crosstab analysis is used and tested using the Chi-Square method based on probability. One important finding of this study is that the bigger the size of capital financing, the bigger the probability of MSMEs to increase the income.

Keywords: Chi-Square test, Crosstab Analysis, Islamic financing, MSMEs

PENDAHULUAN

UMKM merupakan segmen terbesar pelaku ekonomi nasional. UMKM juga merupakan usaha yang kuat menghadapi situasi ekonomi yang sulit, terlihat saat krisis ekonomi melanda Indonesia, UMKM tetap mampu bertahan, bahkan UMKM mampu memberikan sumbangan dalam proses *National Economic Recovery* (Kementerian Perindustrian, 2017). Menurut Antonio (2011), peran UMKM, terutama setelah krisis moneter Asia, dianggap sebagai katup pengaman untuk pemulihan ekonomi nasional baik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun dalam mengurangi tingkat pengangguran. Kredit

yang didistribusikan ke UMKM memiliki risiko minimum dan memiliki kinerja yang lebih baik dan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang lebih besar. Meskipun memiliki peran yang signifikan, UMKM sebenarnya memiliki masalah serius terutama yang terkait dengan kemampuan mereka dalam mengakses lembaga keuangan formal.

Dibalik eksistensinya, usaha mikro, kecil dan menengah juga mengalami permasalahan yang cukup mendasar. Berdasarkan penelitian Ismawan (2002), ditemukan kelemahan utama usaha mikro, kecil menengah adalah: (1) kemampuan usaha mikro, kecil menengah dalam mempertahankan

konsistensinya sebagai lembaga ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, terutama dalam menghadapi pasar bebas, (2) keterbatasan kapasitas, (3) keterbatasan akses, (4) keterbatasan lingkungan usaha. Kemudian hasil survey BPS tahun 2008, menunjukkan bahwa ada 5 (lima) masalah utama yang dihadapi usaha mikro, kecil menengah yaitu: (1) kekurangan modal, (2) kesulitan pemasaran, (3) keterbatasan sumber daya manusia (SDM), (4) kesulitan pengadaan bahan baku, dan (5) masih menggunakan teknologi tradisional.

Salah satu kesulitan yang dialami pengusaha mikro, kecil menengah dalam upaya mengembangkan usahanya adalah kesulitan permodalan. Hal ini disebabkan karena kesulitan mendapatkan dana investasi dan modal kerja dari lembaga keuangan perbankan, karena hingga saat ini lembaga perbankan yang ada belum mampu menjangkau pengusaha mikro, kecil menengah (Widiyanto, 2000). Kondisi itu terjadi karena motif pendirian bank akan mengikuti perkembangan aktivitas perdagangan atau perekonomian suatu daerah. Penyebab kesulitan lain adalah upaya penyaluran kredit bank menggunakan penilaian 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*, yang mana persyaratan ini sulit dipenuhi oleh pengusaha-pengusaha kecil (Kasmir, 2004).

Salah satu bentuk lembaga keuangan mikro yang berkembang di masyarakat adalah perbankan syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu

lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip agama Islam (Sudarsono, 2004). Bank syariah ini salah satunya dicirikan dengan sistem bagi hasil (non bunga) untuk pembagian keuntungannya. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan badan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) (Antonio, 2001).

Tradisi adat Minangkabau dengan falsafah dasar "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" (adat bersendi agama, agama bersendi kitabullah) merupakan suatu cerminan sikap hidup bahwa prinsip-prinsip agama merupakan pedoman dasar dalam kehidupan masyarakat. Atas dasar falsafah dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat Sumatera Barat tersebut maka diperkirakan sistem perbankan syariah dapat berkembang dengan baik di Sumatera Barat. Berdasarkan hal di atas terlihat usaha mikro, kecil, dan menengah dapat menjadi salah satu penggerak sektor ekonomi riil untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi

masyarakat, ditingkatkan melalui pembiayaan syariah, yang sesuai dengan budaya masyarakat Sumatera barat. Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan bagaimana peningkatan usaha masyarakat dari indikator ekonomi yang berbasis pada peran pembiayaan perbankan syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Perbankan Syariah

Bank merupakan lembaga keuangan yang menerima deposit dan menyalurkan ke dalam kredit. Bank adalah lembaga intermediasi keuangan, penghubung antara orang yang memiliki kelebihan modal dengan orang yang memerlukan modal (Mishkin, 2001). Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah (Antonio, 2001).

Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan terdiri dari:

a. *Profit Sharing* (Bagi hasil)

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik

umum atau landasan dasar operasional bank syariah dimana dilakukannya ikatan atau perjanjian bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadinya dengan kerelaan tanpa unsur paksaan masing-masing pihak.

Menurut Antonio (2011), Prinsip-prinsip bagi hasil yang digunakan dalam Bank Syariah adalah:

- 1) *Al-Mudhrabah*, yaitu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan dana seluruhnya dan pihak lain menjadi pengelola. Bila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pihak yang mempunyai selama kerugian bukan kelalaian atau disengaja oleh pengelola.
- 2) *Al-Musyarakah*, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk sesuatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko akan ditanggung bersama dengan kesepakatan.

b. *Revenue Sharing*

Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran

dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif. Maksudnya yaitu penempatan dana bank pada pihak lain, hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan penerimaan bank (Antonio, 2011). Pembiayaan menurut sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi:

- a. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif ini dapat dibagi menjadi:
 - i. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) dan meningkatkan keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
 - ii. Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
- b. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan.

Penelitian Terdahulu

Antonio (2011) membuktikan bahwa BMT memiliki kesempatan untuk menutup layanan

pembiayaan usaha UKM. Terlepas dari kontribusi positif mereka, BMT memiliki beberapa kekurangan yang perlu dikelola dengan benar untuk meningkatkan layanan mereka dan mengembangkan kinerja UKM. Masalah koordinasi antara lembaga keuangan Islam lainnya adalah masalah utama yang harus dipertimbangkan secara serius. Masalah ini dapat didekati dengan memperkenalkan atau memulai skema keuangan Islami kepada perusahaan UKM sehingga mereka dapat menjunjung sinergi strategis yang kuat antara industri perbankan syariah dan program nasional.

Sakhowi dan Chalimah (2016), studinya menguji faktor-faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan berbasis syariah untuk hasil dan kontribusinya terhadap pengembangan UKM di Indonesia. Penentu pembiayaan berbasis syariah, dana pihak ketiga, pembiayaan masalah (*non-performing Finance*), tingkat inflasi, suku bunga pinjaman modal kerja, suku bunga kredit investasi, dan produk domestik bruto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto, Dana Pihak Ketiga dan suku bunga kredit investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Perkembangan pembiayaan perbankan Syariah dalam pengembangan UKM di Indonesia selama 2007-2018 mengalami peningkatan fluktuatif, tetapi secara umum masih memiliki prospek yang signifikan. Sumbangan pembiayaan perbankan syariah dalam pengembangan UKM diperlukan karena banyak UKM yang belum memperoleh

fasilitas pembiayaan.

Dewi dan Kasri (2011), menganalisa studi kasus Koperasi Islam dan masalah yang dihadapi sistem keuangan Islam Indonesia. Dengan demikian, ia mengusulkan inovasi pembiayaan, struktur yang disempurnakan sesuai syari'ah skema pembiayaan *hawalah*, yang bisa meningkatkan operasi koperasi. Analisis dari kontrak hawalah relatif baru dalam Islam literatur keuangan, khususnya di Indonesia konteks. Studi kasus tentang koperasi Islam dan UKM juga dapat memberikan beberapa wawasan baru literatur Islam yang ada.

Nikmah, Sukarno, Mufidah (2018) menganalisis Implikasi Pembiayaan Syariah pada Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan implikasi pembiayaan syariah berupa pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada pedagang kecil berdasarkan kinerja keuangan pedagang kecil. Pengukuran kinerja keuangan dilihat dari aset, omset penjualan dan laba yang didapatkan atau dimiliki pedagang kecil dalam rentan waktu 4 minggu. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa pedagang kecil yang telah mendapat pembiayaan syariah berupa pembiayaan berjenis mudharabah dan musyarakah dari BMT Bina Tanjung rata-rata mampu meningkatkan aset, omset penjualan dan laba dengan baik.

Yuli (2009), menganalisis distribusi pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) pada perwakilan

Bank Mandiri Syariah di Malang dan menganalisis lebih lanjut persepsi debitur (UMKM) terhadap distribusi kredit oleh perwakilan Bank Syariah Mandiri di Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran kredit ke UMKM pada perwakilan Bank Syariah Mandiri di Malang sesuai dengan karakteristik pembiayaan Mudharabah yang ditegaskan oleh Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang persyaratan pembiayaan, jangka waktu dan kondisi, dan juga UU Pembiayaan Mudharabah. Persepsi Mudharib mengenai kredit yang diberikan oleh perwakilan Bank Syariah Mandiri di Malang sangat baik, tidak banyak memakan waktu dan tidak memakan waktu.

Jumhur (2006), menganalisis pinjaman modal kerja usaha kecil di BMT Semarang selama periode 2001-2003. Empat faktor yaitu total asset, keuntungan perbulan, rasio bagi hasil dan tingkat bunga lembaga keuangan lainnya yang mempengaruhi pinjaman modal kerja usaha kecil di BMT. Dari empat variabel indenpenden tersebut terdapat dua variabel indenpenden yang signifikan terhadap pinjaman modal kerja usaha kecil di BMT. Total asset dan tingkat suku bunga dilembaga keuangan lainnya yang memberikan pengaruh dan signifikan terhadap pinjaman modal kerja usaha kecil di BMT.

Novania (2012), menganalisis efektivitas penyaluran kredit modal kerja mikro laju bank CIMB Niaga Malang kepada usaha kecil menengah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses operasional penyaluran dan efektivitas penyaluran kredit Mikro Laju Bank CIMB Niaga Malang dilihat dari kondisi internal bank, kondisi calon debitur, dan kondisi lingkungan bank. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mikro laju bank CIMB Niaga Tamin Malang memiliki profil kredit yang baik. Ini ditunjukkan oleh tingkat NPL yang rendah yaitu 0,27% pada tahun 2011 dan 0,04% jumlah debitur dan pencairan dana kredit meningkat pada tahun 2012. Studi pendahuluan yang telah dilakukan adalah melihat faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berhubungan dengan Bank Syariah di kota Sumatera Barat (Kamarni, 2012), Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel agama, pengetahuan tentang keberadaan bank Islam dan pengetahuan tentang mekanisme produk bank syariah tidak signifikan dalam mempengaruhi masyarakat dengan Bank syariah, sementara variabel pekerjaan, tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran dan preferensi, signifikan dalam mempengaruhi komunitas yang terkait dengan bank syariah.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memaparkan kondisi tertentu dari objek suatu penelitian yaitu permintaan pembiayaan

bank syariah bagi UMKM di Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan data primer yang berasal dari sumber asli atau pertama. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui penyebaran kuisioner terhadap UMKM di Sumatera Barat sebagai responden.

Populasi dan Sampel

Populasi yang dimaksud dari penelitian ini adalah UMKM yang ada di Sumatera Barat yang mendapat pembiayaan dari perbankan syariah yang kira-kira berjumlah 3.105 UMKM (BPS Sumbar, 2017). Teknik pengambilan sampel dilaksanakan dengan penentuan sampel dari beberapa jumlah UMKM di Sumatera Barat sebagai responden, yang diambil dengan memakai Model Slovin (Sugiyono, 2012) dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1+N e^2}$$

keterangan:

n = Besar sampel

N = Besar populasi

e = *Sampling error*

Pertimbangan ini didasarkan pada homogenitas sampel yakni jumlah UMKM di Sumatera Barat dengan kecenderungan karakteristik yang sama. Banyaknya sampel dalam penelitian ini dengan mempergunakan tingkat kesalahan sampel 5% yaitu 97,89 atau dibulatkan menjadi 100 UMKM. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan metode pengambilan sampel *purposive sampling* (Sugiyono, 2012). Lokasi penelitian ini adalah

kota-kota besar yang berada di Sumatera Barat yang ada perbankan syariah di daerah tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif frekuensi dan analisis *crosstab*. Dasar pengambilan keputusan pada *crosstab* berdasarkan uji *Chi-Square* dengan dasar probabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cross Tabulasi Jumlah Pembiayaan dengan Peningkatan Pendapatan UMKM

UMKM yang mendapatkan pembiayaan besar dari Rp. 10.000.000 lebih berpeluang meningkat pendapatannya daripada UMKM yang memperoleh pembiayaan kecil dari Rp. 10.000.000.

Tabel 1. Cross Tabulasi Jumlah Pembiayaan dan Peningkatan Pendapatan UMKM

| Variabel Jumlah Pembiayaan | Pendapatan | | Total | Persentase | Pearson Chi-Square | |
|----------------------------------|------------|--------------------|------------|------------|--------------------|--------------------------|
| | Meningkat | Tidak Meningkat | | | Value | Asymp. Sig. (2-sided) |
| ≤ Rp 10.000.000 | 6 | 12 | 18 | 18 | 11.253 | .001 |
| > Rp 10.000.000 | 61 | 21 | 82 | 82 | | |
| Total | 67 | 33 | 100 | 100 | | |

Hasil *p-Value Pearson Chi-Square* pada tabel diatas sebesar 0,01 (<0,05) menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah dengan peningkatan pendapatan UMKM. Artinya semakin besar pembiayaan yang diperoleh UMKM, akan semakin besar peluang UMKM meningkatkan pendapatannya. Hal ini karena modal merupakan salah satu faktor penting yang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah

usaha, semakin besar modal yang dimiliki sebuah usaha maka akan semakin besar kekuatan untuk mengembangkan usahanya dan juga kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Cross Tabulasi Pendidikan Responden dengan Peningkatan Pendapatan UMKM

Peluang UMKM akan meningkat pendapatannya jika pendidikan pemilik semakin tinggi lebih besar daripada sebaliknya.

Tabel 2. Cross Tabulasi Pendidikan dengan Pendapatan UMKM

| Variabel Pendidikan | Pendapatan | | Total | Persentase | Pearson Chi-Square | |
|------------------------|------------|--------------------|------------|------------|--------------------|--------------------------|
| | Meningkat | Tidak Meningkat | | | Value | Asymp. Sig. (2-sided) |
| ≤ SMP | 15 | 16 | 31 | 31 | 7.040 | .008 |
| ≥ SMA | 52 | 17 | 69 | 69 | | |
| Total | 67 | 33 | 100 | 100 | | |

Berdasarkan hasil *p-Value Pearson Chi-Square* pada tabel diatas sebesar 0,008 ($< 0,05$) maka terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan peningkatan pendapatan UMKM. Semakin tinggi pendidikan maka berpeluang meningkatkan pendapatan UMKM.

Cross Tabulasi Lama Berdiri Usaha dengan Peningkatan Pendapatan UMKM

Peluang UMKM akan meningkat pendapatannya jika lama berdiri usaha semakin tinggi lebih besar daripada sebaliknya. Pengalaman usaha lebih lama mempunyai peluang peningkatan pendapatan lebih besar. UMKM yang telah memiliki pengalaman usaha lebih dari lima tahun yang mampu meningkatkan pendapatannya daripada yang kurang dari lima tahun.

Tabel 3. Cross Tabulasi Lama Usaha dan Peningkatan Pendapatan UMKM

| Variabel Lama Usaha (tahun) | Pendapatan | | Total | Persentase | Pearson Chi-Square | |
|-----------------------------|------------|--------------------|------------|------------|--------------------|-----------------------|
| | Meningkat | Tidak Meningkatkan | | | Value | Asymp. Sig. (2-sided) |
| ≤ 5 tahun | 21 | 23 | 44 | 44 | 13.200 | .000 |
| > 5 tahun | 46 | 10 | 56 | 56 | | |
| Total | 67 | 33 | 100 | 100 | | |

Berdasarkan hasil *p-Value Pearson Chi-Square* pada tabel diatas yaitu sebesar 0,000 ($< 0,05$) maka berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara lama usaha dengan peningkatan pendapatan UMKM.

Cross Tabulasi Jenis Usaha dengan Peningkatan Pendapatan UMKM

Peluang UMKM akan meningkat pendapatannya jika jenis usahanya dagang lebih besar daripada yang lainnya. Namun peluang ini tidaklah signifikan.

Tabel 4. Cross Tabulasi Jenis Usaha dengan Pendapatan UMKM

| Variabel Jenis Usaha | Pendapatan | | Total | Persentase | Pearson Chi-Square | |
|----------------------|------------|--------------------|------------|------------|--------------------|-----------------------|
| | Meningkat | Tidak Meningkatkan | | | Value | Asymp. Sig. (2-sided) |
| Dagang | 43 | 22 | 65 | 65 | .060 | .806 |
| Industri dan Jasa | 24 | 11 | 35 | 35 | | |
| Total | 67 | 33 | 100 | 100 | | |

Berdasarkan hasil *p-Value Pearson Chi-Square* pada tabel sebesar 0,806 ($> 0,05$), yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis usaha dengan peningkatan pendapatan UMKM. Hal ini menyatakan bahwa keberhasilan UMKM tidak tergantung pada jenis usahanya,

namun lebih disebabkan hal-hal lainnya, misalnya inovasi dari pengusaha, peraturan pemerintah, daya beli masyarakat, dan hal lainnya.

Cross Tabulasi Pelatihan Pengembangan Usaha dengan Peningkatan Pendapatan UMKM

Peluang UMKM akan meningkat pendapatannya

jika pemilik mengikuti pelatihan pengembangan usaha daripada yang tidak pernah mengikuti.

Tabel 5. Cross Tabulasi Pelatihan Pengembangan Usaha dan Pendapatan UMKM

| Variabel Pelatihan | Pendapatan | | Total | Persentase | Pearson Chi-Square | |
|--------------------|------------|--------------------|------------|------------|--------------------|-----------------------|
| | Meningkat | Tidak Meningkatkan | | | Value | Asymp. Sig. (2-sided) |
| Pernah | 49 | 9 | 58 | 58 | 19.090 | .000 |
| Tidak pernah | 18 | 24 | 42 | 42 | | |
| Total | 67 | 33 | 100 | 100 | | |

Nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pelatihan pengembangan usaha dengan peningkatan pendapatan UMKM. Pelatihan pengembangan usaha akan memperbesar peluang UMKM untuk meningkatkan pendapatannya.

Cross Tabulasi Laporan Keuangan dan Peningkatan Pendapatan UMKM

Sebagian besar dari UMKM yang telah

memiliki laporan keuangan, berpeluang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Namun, peluang yang diperoleh tidaklah signifikan karena hasil *p-Value Pearson Chi-Square* sebesar 0,318 dimana $0,318 > 0,05$. Ini berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan laporan keuangan dengan peningkatan pendapatan UMKM.

Tabel 6. Cross Tabulasi Laporan Keuangan dan Pendapatan UMKM

| Variabel Laporan Keuangan | Pendapatan | | Total | Persentase | Pearson Chi-Square | |
|---------------------------|------------|--------------------|------------|------------|--------------------|-----------------------|
| | Meningkat | Tidak Meningkatkan | | | Value | Asymp. Sig. (2-sided) |
| Sudah ada | 58 | 26 | 84 | 84 | .996 | .318 |
| Belum ada | 9 | 7 | 16 | 16 | | |
| Total | 67 | 33 | 100 | 100 | | |

Cross Tabulasi Legalitas Usaha dan Peningkatan Pendapatan UMKM

UMKM yang tidak memiliki izin usaha yang dapat meningkatkan usahanya hanya 13% dan sisanya tidak dapat meningkatkan pendapatannya. Sementara itu dari 64 dari

total responden yang telah memiliki izin usaha, terdapat 54 responden yang dapat meningkatkan pendapatannya dan sisanya sebanyak 10 responden yang telah memiliki izin usaha tidak dapat meningkatkan pendapatannya.

Tabel 7. Cross Tabulasi Legalitas Usaha dan Pendapatan UMKM

| Variabel Legalitas Usaha | Pendapatan | | Total | Persentase | Pearson Chi-Square | |
|--------------------------|------------|--------------------|------------|------------|--------------------|-----------------------|
| | Meningkat | Tidak Meningkatkan | | | Value | Asymp. Sig. (2-sided) |
| Tidak ada izin usaha | 13 | 23 | 36 | 36 | 24.274 | .000 |
| Sudah ada izin usaha | 54 | 10 | 64 | 64 | | |
| Total | 67 | 33 | 100 | 100 | | |

Nilai signifikan $0,000 < 0,05$ mengartikan terdapat hubungan yang signifikan antara legalitas usaha dengan peningkatan pendapatan UMKM. Hal ini menyatakan bahwa kepemilikan izin usaha bagi UMKM sangat penting, agar kenyamanan dan keamanan dalam berusaha menjadi prioritas.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan analisis pembiayaan syariah yang diperoleh UMKM, hasil survey menunjukkan sangat pentingnya pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah bagi peningkatan pendapatan UMKM, yang pada akhirnya meningkatkan permintaan pembiayaan UMKM pada perbankan syariah. Selain itu karakteristik kelembagaan usaha dan karakteristik pengusaha terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Sumatera Barat menunjukkan bahwa karakteristik yang diteliti tersebut cukup berdampak positif bagi peningkatan pendapatan UMKM, namun hasil ini belumlah maksimal terhadap pengembangan dan peningkatan pendapatan UMKM di Sumatera Barat.

Oleh sebab itu kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pengembangan UMKM adalah secara terus

menerus mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi keberadaan/eksistensi UMKM, diantaranya memberikan kemudahan para pendiri UMKM untuk mendapatkan izin usaha, secara intensif memberikan sosialisasi mengenai aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh UMKM, pelatihan, dan bantuan permodalan yang lebih banyak kepada UMKM untuk memancing pertumbuhan usaha-usaha baru, terutama bagi usaha baru yang belum stabil. Hal ini tentu akan memberikan semangat tersendiri kepada UMKM dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Praktik perizinan satu atap (SINTAP) di beberapa daerah yang berhasil (*best management practices*) perlu di sosialisasikan, diadopsi, dan diadaptasi sesuai dengan konteks lokal agar memudahkan pelaku UMKM. Namun semua upaya pemerintah ini tentu harus dibarengi dengan kesadaran dari para pengusaha. Apabila para pengusaha hanya mengandalkan sokongan dari pemerintah dan tidak mengimplementasikan kebijakan tersebut, tentu hal ini tidak akan berjalan dengan baik dan tidak mendapatkan hasil yang optimal secara berkelanjutan.

Selanjutnya, implikasi kebijakan yang harus dilakukan oleh perbankan syariah yaitu lebih

banyak lagi menyalurkan pembiayaan sehingga UMKM tidak kekurangan modal didalam menjalankan usahanya, karena permasalahan yang paling banyak ditemui dilapangan adalah kekurangan modal. Bantuan permodalan. Diperlukan perluasan skim pembiayaan dengan bagi hasil, termasuk skim khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi pelaku usaha. Upaya pemerintah melalui program pemberian KUR (kredit usaha rakyat) untuk modal kerja bagi pelaku usaha merupakan salah satu program dan kegiatan strategis yang perlu dikembangkan untuk penguatan permodalan bagi UMKM. Disamping itu, UMKM tetap konsisten memanfaatkan jasa-jasa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, maupun lembaga non bank lainnya yang tentunya dengan akad bagi hasil.

Jadi, dari hasil yang telah dijabarkan dapat dilihat bahwa pemerintah daerah harus banyak melakukan tindakan-tindakan atau kebijakan yang dapat mendorong meningkatnya pendapatan UMKM, agar memberikan kontribusi yang baik bagi perekonomian Sumatera Barat dan sekaligus mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil estimasi data, peluang peningkatan pendapatan UMKM yang paling besar dilihat dari sisi jumlah pembiayaan. UMKM yang memperoleh pembiayaan lebih tinggi, berpeluang meningkat pendapatan UMKMnya. Hal ini menunjukkan permintaan pembiayaan

dari perbankan syariah oleh UMKM akan sangat berkembang dalam meningkatkan usaha UMKM. Banyak UMKM sudah mulai memilih perbankan syariah karena adanya unsur riba dalam perbankan konvensional. Hasil ini diperkuat dengan *Chi-Square test* yang menunjukkan hubungan yang signifikan antara jumlah pembiayaan Bank Syariah dengan peningkatan pendapatan UMKM.

Peluang yang besar bagi peningkatan UMKM selanjutnya adalah UMKM yang telah memiliki laporan keuangan. Pendidikan responden SMA ke atas lebih berpeluang yang meningkat pendapatannya. Hal ini menunjukkan peningkatan pendidikan menjadi unsur penting dalam peningkatan pendapatan UMKM. UMKM yang telah memiliki pengalaman usaha lebih dari lima tahun yang lebih berpeluang dapat meningkatkan pendapatannya. Sebagian besar jenis usaha UMKM adalah dagang yaitu dengan persentase sebesar 65%. Jenis usaha dagang mempunyai peluang yang lebih mampu meningkatkan pendapatannya. Responden yang pernah mengikuti pelatihan usaha berpeluang lebih besar dapat meningkatkan pendapatan mereka daripada yang tidak memperoleh pelatihan.

Hasil *Chi-Square test* menunjukkan hubungan yang signifikan antara jumlah pembiayaan, pendidikan, lama usaha, pelatihan pengembangan usaha, dan legalitas usaha dengan peningkatan pendapatan UMKM. Sementara itu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis usaha dan kepemilikan laporan keuangan dengan

peningkatan pendapatan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2011). Islamic Microfinance Initiatives To Enhance Small And Medium Enterprises In Indonesia: From Historical Overview to Contemporary Situation. *Journal of Indonesian Islam*. 5(2).
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Astuti, D., & Widiatmoko. (2003). Profil Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jawa Tengah. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 2(3).
- Dewi, M. K. & Kasri, R. A. (2011). SMEs Financing Innovation Application of Hawalah In Islamic Cooperative (Case Study). *International Journal of Excellence In Islamic Banking and Finance*, 1(2).
- Ismawan, B. (2002). *Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Otonomi Daerah*. Ekonomi Rakyat Online: www.ekonomi rakyat.org.
- Jumhur. (2006). *Analisis Permintaan Kredit Modal Kerja Usaha Kecil di Pontianak*. Pontianak: Universitas Tanjungpura Pontianak
- Kamarni, N. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat dalam Berhubungan dengan Bank Syariah di Kota Sumatera Barat. *Jurnal manajemen dan kewirausahaan*, 3.
- Kasmir. (2004). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mankiw, N. G. (2003). *Teori Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mishkin, F. (2001). *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*. America: Columbia University.
- Nanga, M. (2001). *Makro Ekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nikmah, C., Sukarno, H., & Mufidah, A. (2018). Analisis Implikasi Pembiayaan Syariah pada Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember. *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 1(1), 8-15.
- Novania, S. D. (2012). Analisis Efektivitas Penyaluran Kredit Modal Kerja Mikro Laju Bank CIMB Niaga Malang kepada Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Ekonomi*.
- Nugroho, B. A. (2005). *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Partomo, T. & Soejodono. (2004). *Ekonomi Skala Kecil atau Menengah dan Koperasi*. Jakarta: Ghalia.
- Sakhowi, A., & Chalimah. (2016). Determinants of Syari'ah Based Financing and its Contribution For Smes Development. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 2(1).
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. H. (2002). *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widayati, T. (2003). *Peran Perbankan dalam Pengembangan Keuangan Mikro, Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro*. Jakarta: Business Innovation Center of Indonesia kerjasama

Kantor kementrian Koperasi.

Widyanto. (2000). Kemampuan Lembaga Keuangan Mikro dalam Menjangkau Pengusaha Kecil, Mengelola Dana, Menghimpun Serta Menyalurkan ZIZ. *Ekobis*, 1(2).

Yuli, S. B. C. (2009). Analisis Pembiayaan Syariah pada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. *Intermediasi Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 5(1).

